



ISLAMO-PANCASILA

Asep Sahid Gatara

Kepala Bidang Advokasi PSIP UIN Bandung; Wakil Ketua ICMI
Jawa Barat. C.P: 085315550365/08156121636 Email: asepsahidgatara@uinsgd.ac.id

Relasi Islam dan Pancasila merupakan salah satu isu penting yang sulit dilewatkan dalam setiap ikhtiar merawat dan meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru-baru ini misalnya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam ikhtiarnya itu telah membentuk Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kehadiran Pusat Studi Islam dan Pancasila seperti di atas relevan dan urgen serta menemukan momentumnya ketika masyarakat Indonesia terus menerus diuji oleh berbagai permasalahan dasar berbangsa dan bernegara. Terlebih, pusat studi tersebut mengambil fokus perhatian terhadap relasi Islam dan Pancasila sebagai distingsinya.

Fokus perhatian demikian itu dinilai sangat relevan dan urgen mengingat permasalahan dasar berbangsa dan bernegara lebih banyak diwarnai oleh kegaduhan hubungan Pancasila dan Islam.

Dari masa ke masa, relasi kegaduhan Pancasila dan Islam tersebut dikipasi atau dikompori oleh berbagai penyajian wacana-wacana ataupun isu-isu yang hampir sama. Sebut saja seperti ujaran bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam.

Sejauh ini penyajian-penyajian isu seperti itu memang efektif dalam mendangkalkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan keislaman dan keindonesiaan. Dan pada gilirannya ia mampu melahirkan sikap ketertutupan dan prasangka-prasangka buruk terhadap orang-orang atau kelompok masyarakat lain dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, isu demikian itu sering kali menjelma menjadi bola panas serta liar yang kapan saja bisa dimainkan dan digelindingkan ke tengah kehidupan masyarakat.

Tentu semua itu menjadi kontraproduktif dengan esensi lahirnya Pancasila di bumi nusantara yang dasarnya memang bineka. Tentunya juga semua itu mengundang resiko yang sangat besar, seperti potensi tergerogotinya bangunan NKRI.

Mirisnya, penyajian isu-isu tersebut merupakan bagian dari permainan politik eksistensi belaka ketimbang pergulatan substansi. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang melingkarinya pun merupakan kumpulan berbagai kepentingan kekuasaan, seperti perluasan, pemupukan dan perebutan kursi jabatan politik. Kepentingan-kepentingan itu banyak memanfaatkan ruang kesalahpahaman antara masyarakat pengguna Pancasila, khususnya antara masyarakat Islam dan sekuler.

Seperti diketahui, pada masing-masing kelompok masyarakat tersebut biasanya melahirkan, meminjam istilah Kuntowijoyo (1997), *zealot*, yaitu orang yang terlalu bersemangat atau garis keras pada kedua sistem simbol tersebut. Kelompok masyarakat garis keras Pancasila (*zealotisme*), misalnya, sangat mudah menuduh terhadap segala gerakan umat Islam akan selalu bermuara pada pendirian “Negara Islam” atau penerapan “Perda Syariah”. Demikian juga sebaliknya, gerakan umat Islam gampang menuduh terhadap segala gerakan masyarakat garis keras Pancasila akan selalu bermuara pada program deislamisasi, sekularisasi, dan bahkan menjadikan Pancasila sebagai agama.

Perkara substansi

Perlu disampaikan sekali lagi bahwa perseteruan Islam dan Pancasila semacam itu sebenarnya banyak berlangsung pada praktik atau eksistensi ketimbang pada substansi. Oleh sebab itu, dibutuhkan resolusi yang semakin relevan dan efektif. Di antara resolusi yang dinilai relevan dan efektif itu adalah mendudukkan kembali substansi dari kedua sistem simbol tersebut. Yaitu, Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Islam sebagai agama menyediakan nilai-nilai universal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Sementara itu, Pancasila sebagai ideologi dituntut tetap pada jati dirinya dalam mendefinisikan dan memposisikan agama (Islam), baik ke dalam maupun ke luar.

Dengan demikian, sila-sila dalam Pancasila menjadi sangat mustahil akan bersebrangan dengan Islam. Sebaliknya, tidak akan ada satu pun ajaran Islam yang bersebrangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Dalam kerangka itu, Islam sesungguhnya telah memberikan landasan wawasan, keyakinan, ruh, dan nafas bagi Pancasila. Dari titik ini dapatlah dikatakan bahwa Pancasila itu hakikatnya berjiwa Islam, dan suatu ideologi yang tidak berwajah sekuler. Istilah yang dapat menggambarkan realitas itu adalah Islamo-

Pancasila. Suatu istilah yang mencakup relasi esensi keislaman dan kepancasilaan yang saling berkontribusi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Pengawasan ilmiah

Sejatinya, tidak perlu ada lagi persetujuan antara keduanya bila saja seluruh masyarakat Indonesia mau mendudukan kembali perkara substansi relasi Islam dan Pancasila. Tentu dengan syarat harus ada ikhtiar berkelanjutan dalam mengawal atau mengadvokasinya. Pembentukan pusat-pusat studi Pancasila di semua perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Umum maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan satu ikhtiar pengawasan secara ilmiah yang pengerjaannya akan lebih sistematis, teoritis, dan praktis.

Pengawasan tersebut menjadi bagian dari penguatan terhadap pendekatan baru dalam harmonisasi Pancasila dan Islam, yaitu pendekatan Ilmu. Sebelumnya lebih banyak memakai pendekatan mitos yang terbukti rawan disalahgunakan. Dengan pendekatan ilmu, diharapkan sebaliknya karena sifatnya yang memang akan lebih terbuka. Hatta, Pancasila sebagai ideologi negara akan tetap terawat secara komprehensif dan secara bersamaan Islam sebagai agama mayoritas tetap terangkat derajatnya dengan spirit ketuhanan yang berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. *Wallahu 'alam bi shawab.*